

## ***KONI Pusat Akan Kirim Surat Badan Hukum ke KONI Daerah***

### ● Persyaratan Proposal Dana Hibah

**SALATIGA** - KONI Pusat akan mengirim kopian surat tentang badan hukum KONI ke daerah-daerah. Hal ini menanggapi keresahan para pengurus KONI daerah berkaitan pencairan dana hibah oleh pemerintah daerah setempat yang sekarang harus berbadan hukum.

Hal itu disampaikan Ketua Umum KONI Pusat, Tono Suratman, saat memberi materi dalam Workshop Manajemen Keolahragaan yang diselenggarakan KONI Jateng di Tlogo Resort Tuntang, Rabu (5/8).

Pembicara lain yaitu Kajati Jateng Hartadi bersama Asintel J Hendrik P dan Ketua Tim Senior Subaud Jateng I BPK Perwakilan Jateng Eko Andy Purnomo.

Kegiatan dibuka Ketua Umum KONI Jateng Hartono yang dihadiri perwakilan 35 KONI kabupaten/kota, 53 pengurus provinsi cabang olahraga, dan tujuh badan fungsional KONI.

"Saya tegaskan bahwa badan hukum KONI itu hanya satu yaitu di KONI Pusat. KONI dae-

rah hingga turunannya sampai ke kecamatan tidak usah membuat badan hukum lagi. Oleh karena itu kami akan mengirim kopian surat badan hukum KONI ke daerah-daerah," kata Tono Suratman.

#### **Resah**

Dalam workshop itu, sejumlah perwakilan KONI daerah mengaku resah dengan aturan Kemendagri yaitu organisasi yang boleh mendapatkan bantuan hibah harus berbadan hukum. Dampaknya, di setiap KONI daerah kesulitan mendapatkan bukti badan hukum itu. Akibatnya, pemerintah setempat enggan mencairkan dana bantu-

an ke KONI.

"Kami mengimbau kepada para pengurus KONI daerah untuk tidak ragu-ragu dalam bekerja. KONI adalah organisasi kuat sehingga para pengurus harus bekerja keras dan kreatif untuk memajukan olahraga," katanya.

Berkaitan dengan dana bantuan KONI dari pemerintah, Tono juga akan berjuang melobi pemerintah melalui Mendagri bahwa KONI bukan seperti organisasi yang lain. Artinya bantuan KONI boleh diberikan terus-menerus setiap tahun.

Kajati Jateng Hartadi dalam paparannya mengatakan, dana

hibah dan bansos dapat mengalami berbagai permasalahan baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, maupun penatausahanya. Tidak sedikit permasalahan pengelolaan hibah dan bansos tersebut membawa kepala daerah dan pengelolanya ke dalam permasalahan hukum.

"Saat ini dana hibah tidak bisa lagi asal diberikan tanpa tolok ukur. Dana hibah akan diperiksa oleh **BPK** dan kalau ada yang tidak sesuai bisa diusut secara hukum," katanya.

Menurutnya, pemberian dana hibah dan bansos harus berpegang pada azas keadilan, kepatu-



SMMoch Kundori

**BERI PAPARAN :** Ketua Umum KONI Pusat Tono Suratman (tengah) memberi paparan dalam workshop manajemen keolahragaan, KONI Jateng di Tlogo Resort Tuntang, Rabu (5/8). (73)

tan, rasionalitas, dan manfaat yang luas bagi masyarakat. Sehingga, jauh dari kepentingan

pribadi dan kelompok serta kepentingan politik pemerintah daerah. (H32-73)